

Wagub: Telaah Hasil Audit BPK

PONTIANAK, TRIBUN - Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya meminta seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat kabupaten/kota segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas beberapa temuan dalam laporan hasil keuangan.

"Kita mau kepala SKPD dan pimpinan unit masing-masing serius dan turun tangan langsung. Masalah siapa yang mengerjakan, itu tentu ada bagian staf-stafnya, termasuk segeralah membikin tindak lanjut temuan ini laporan hasil pemeriksaan ini," ujar Christiandy usai penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar Semester II Tahun 2012 pada pemerintah provinsi/kota/kabupaten di Kalbar di Aula Gedung Perwakilan BPK RI, Rabu (30/1).

Wagub menyatakan, apa yang menjadi temuan hendaknya segera ditelaah untuk mengetahui letak kesalahan dan kebenarannya.

"Saya ingatkan kembali konotasinya. Ini bukan data korupsi. Temuan itu ada yang sifatnya kepatuhan, ada yang sifatnya administrasi, yang mana nanti kalau pun tebal-tebal ditindaklanjuti tentu dengan aturan. Bisa jadi semuanya *clear*," tukasnya.

Dikatakannya, tidak menutup kemungkinan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan masing-masing SKPD menjadi pertimbangan dan referensi dalam pelantikan pejabat eselon baik di tingkat Pemprov maupun kabupaten/kota.

"Makanya SKPD serius menindaklanjuti ini temuan-temuan ini. Kita menunggu secara menyeluruh. Mungkin Maret baru ada hasil. Kalau ini, baru entitas terbatas. Kalau di

provinsi baru Dispenda dan rumah sakit dan beberapa yang sudah kena APBD," jelasnya.

Christiandy juga menanggapi baik rencana audit elektronik yang akan diterapkan BPK dalam setiap pengeluaran pejabat daerah. "Ini mempermudah audit kita. Misalnya mereka mengaudit perjalanan dinas, betul apa tidak. Ini agar tidak fiktif, ada kode, kalau boking tidak ada pergi lain kodenya," jelasnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Adi Sudibyo dalam pemaparannya menyatakan, secara umum hasil pemeriksaan atas belanja daerah pada tujuh entitas belum sepenuhnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

■ **Bersambung ke Hal. 15**

Wagub: Telaah Hasil Audit BPK

Sambungan Hal. 9

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

"Di antaranya belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan, kegiatan pengadaan peralatan dan mesin dan pengadaan buku belum sesuai ketentuan, realisasi belanja bantuan keuangan belum dilengkapi laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan hibah, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga belum sepenuhnya mempedomani ketentuan," jelasnya.

Adapun dari tujuh entitas yang diperiksa antara lain terhadap belanja daerah pada Provinsi Kalbar, Singkawang, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, Sambas dan Melawi. Selain itu, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Ketapang, LHP atas Operasional RSUD dr Soedarso Ponti-

anak, LHP Kinerja pada RSUD Ade Mohammad Djoen Sintang dan RSUD Agoes Djam Ketapang, serta LHP Kinerja pada Dinas Kesehatan Pontianak dan Kota Singkawang.

Dia memaparkan, LHP atas PAD pada Kabupaten Ketapang menunjukkan bahwa pengelolaan PAD belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara untuk LHP atas operasional RSUD dr Soedarso menunjukkan bahwa RSUD dr Soedarso belum sepenuhnya melaksanakan operasionalnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pen-

gelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr Soedarso.

"Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja pada dua dinas kesehatan dan dua RSUD menunjukkan bahwa kinerja pada empat entitas tersebut masih belum dan kurang efektif. Hal ini tercermin dalam tahapan pelaksanaan program, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi," jelasnya.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, BPK mengharapkan seluruh entitas yang diperiksa dapat segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam setiap LHP, di mana hasil pemeriksaan tersebut akan mendukung pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. (ita)